

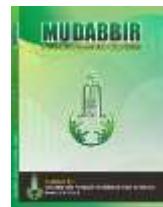


JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Refleksi Kritis Pendidikan Paulo Freire Terhadap Kurikulum Merdeka di Indonesia

Sisca Theresia Situmorang¹, Diva Indah Maria Pandiangan², Sarah Fergy Simangunsong³, Grace Angel Florense Purba Siboro⁴, Valentina Margaretha Marbun⁵, Enzeria Neva Purba⁶, Mesriana Pandiangan⁷, Christa Voni Roulina Sinaga⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Email: siscasitumorang450@gmail.com¹, divaindahmariaa@gmail.com²,
fergysarah5@gmail.com³, graceangelsiboro04@gmail.com⁴,
valentinamarbun9@gmail.com⁵, purbaenze@gmail.com⁶, rea03pandiangan@gmail.com⁷,
christaunimed@gmail.com⁸

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kurikulum Merdeka dalam perspektif pendidikan kritis Paulo Freire, khususnya dalam kaitannya dengan konsep pendidikan sebagai praksis pembebasan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan analisis kritis-interpretatif terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka, buku-buku utama karya Freire, serta literatur ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka membawa semangat desentralisasi dan fleksibilitas melalui konsep seperti merdeka belajar, projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5), dan diferensiasi pembelajaran, secara substantif kurikulum merdeka belum sepenuhnya mewujudkan pendidikan pembebasan dalam makna Freirean. Guru masih diposisikan sebagai pelaksana kebijakan ketimbang sebagai subjek ideologis yang mampu merumuskan pendidikan secara kontekstual dan transformatif. Pelatihan guru lebih banyak bersifat teknis dan prosedural, bukan penguatan kapasitas kritis. Selain itu, ruang dialog dalam pembelajaran masih bersifat superfisial dan belum menyentuh struktur ketimpangan sosial secara sistematis. Proyek P5 juga cenderung menekankan aktivitas moral-spiritual yang netral secara politik dan belum diarahkan untuk membongkar realitas ketidakadilan sosial. Dalam pandangan Freire, situasi ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi instrumen kontrol baru yang terselubung dalam narasi kebebasan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi ideologis dan praksis dalam implementasi Kurikulum Merdeka agar lebih sesuai dengan semangat pendidikan kritis dan transformatif.

Kata Kunci: Pendidikan Kritis; Paulo Freire; Kurikulum Merdeka

ABSTRACT

This study aims to examine the Merdeka Curriculum through the lens of Paulo Freire's critical pedagogy, particularly in relation to the concept of education as a praxis of liberation. The method employed is a literature study using a critical-interpretative analysis approach, focusing on curriculum policy documents, Freire's major works, and relevant scholarly literature. The findings reveal that while the Merdeka Curriculum promotes decentralization and flexibility through concepts such as Merdeka Belajar (freedom to learn), the Pancasila Student Profile Project (P5), and differentiated instruction, it does not fully embody Freirean ideals of emancipatory education. Teachers are still positioned primarily as policy executors rather than ideological agents capable of shaping education in a contextual and transformative manner. Teacher training largely remains technical and procedural, with limited emphasis on fostering critical consciousness. Moreover, classroom dialogue tends to be superficial and fails to address structural social inequalities. The P5 initiative also tends to focus on moral and spiritual activities that are politically neutral, rather than fostering critical engagement with social injustice. From Freire's perspective, this situation suggests that the Merdeka Curriculum risks becoming a new form of control, masked by a narrative of freedom. Therefore, this study recommends an ideological and practical reorientation in the implementation of the Merdeka Curriculum to align more closely with the principles of critical and transformative education

Keywords: Critical Pedagogy; Paulo Freire; Merdeka Curriculum

PENDAHULUAN

Kurikulum Merdeka telah menjadi salah satu wacana sentral dalam reformasi pendidikan nasional yang muncul sebagai respons terhadap disrupsi sistem pembelajaran akibat pandemi COVID-19 dan tuntutan abad ke-21. Kebijakan ini digagas sebagai solusi untuk menghadirkan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan serta potensi peserta didik. Prinsip diferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi komponen utama dalam desain kurikulum ini. Pemerintah memperkenalkan istilah "merdeka belajar" untuk menegaskan pentingnya otonomi guru dan sekolah dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal (Hutahaean et al., 2024).

Implementasi Kurikulum Merdeka tidak terlepas dari berbagai kritik, khususnya menyangkut substansi nilai-nilai kemerdekaan yang diusungnya. Banyak pihak menilai bahwa meskipun kurikulum ini menawarkan kebaruan dalam aspek administratif dan struktur pembelajaran, esensi kemerdekaan dalam pendidikan belum sepenuhnya terwujud secara filosofis maupun pedagogis. Dalam praktiknya, masih ditemukan pola-pola pembelajaran yang bersifat mekanistik, hierarkis, dan menempatkan peserta didik sebagai objek yang pasif dalam proses pendidikan. Kurikulum ini belum secara menyeluruh menggeser paradigma lama menuju pembelajaran yang benar-benar dialogis, partisipatif, dan membebaskan. Dengan demikian, meskipun secara normatif Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas dan kemandirian, pelaksanaannya masih

memperlihatkan keterikatan pada pendekatan konvensional yang tidak selaras dengan semangat emansipasi pendidikan (Nur Kholifah Akrom et al., 2023).

Pemikiran Paulo Freire menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis kritis. Freire menyuarakan bahwa pendidikan tidak semestinya menjadi proses pemindahan pengetahuan yang menindas, melainkan harus menjadi proses pembebasan yang membangkitkan kesadaran kritis (Roberts, 2015). Pendidikan tidak boleh memosisikan peserta didik sebagai wadah kosong yang pasif menerima pengetahuan dari guru. Sebagai gantinya, Freire menawarkan pendekatan *problem-posing education*, yang mengedepankan dialog, refleksi, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman dan realitas sosial mereka (Giroux, 2010b).

Persoalan pelaksanaan Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai kendala konseptual dan praktis. Banyak pendidik belum memahami secara utuh filosofi yang mendasari kurikulum, sehingga pendekatan pembelajaran yang diterapkan masih bersifat instruksional, berorientasi pada hasil, dan tetap berpusat pada guru (Lestari et al., 2023). Ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek atau pendekatan diferensiasi (Aisyah & Novita, 2025). Proses pembelajaran masih berlangsung satu arah, tanpa ruang dialogis yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran kritis peserta didik (Ardianti & Amalia, 2022). Realitas ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan yang dijanjikan oleh Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya menyentuh aspek praksis dan transformatif sebagaimana dimaksud dalam pendidikan kritis. Oleh karena itu, dibutuhkan pembacaan filosofis dan ideologis yang lebih dalam untuk menilai apakah kurikulum ini betul-betul menjadi alat pembebasan atau justru menjadi bentuk baru dari penindasan yang terselubung.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas Kurikulum Merdeka dari sudut pandang implementasi (Wahyudi et al., 2024), kesiapan guru (Sutinah et al., 2024), efektivitas metode pembelajaran (Nurfadila et al., 2023), hingga persepsi terhadap pelaksanaan Proyek Profil Pelajar Pancasila (Hanifah et al., 2023). Meski demikian, mayoritas kajian tersebut bersifat deskriptif, teknis, dan praktis, serta belum banyak yang mengkaji kurikulum ini dalam perspektif filsafat pendidikan kritis. Minimnya telaah terhadap dimensi ideologis dan pedagogis dari Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya celah kajian yang masih terbuka lebar. Kajian yang menghubungkan prinsip-prinsip pedagogi Freirean dengan praktik Kurikulum Merdeka di Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih substantif tentang arah dan orientasi kebijakan pendidikan nasional. Dengan demikian, kajian kritis terhadap Kurikulum Merdeka dalam perspektif Freire berkontribusi untuk memperkaya wacana akademik dan menawarkan alternatif konseptual yang lebih membebaskan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perspektif pendidikan kritis Paulo Freire sebagai pisau analisis utama. Kajian ini berupaya mengevaluasi secara konseptual sejauh mana prinsip-prinsip pembebasan dalam pendidikan seperti dialog, kesadaran kritis,

dan transformasi sosial tercermin dalam desain dan implementasi Kurikulum Merdeka. Harapannya, kajian ini dapat memperluas pemahaman terhadap arah reformasi pendidikan nasional yang tidak hanya adaptif secara struktural, tetapi juga mampu membentuk peserta didik sebagai subjek yang sadar, kritis, dan berdaya. Pertanyaan kunci yang diajukan dalam penelitian ini adalah: sejauh mana Kurikulum Merdeka mencerminkan nilai-nilai pendidikan pembebasan sebagaimana dikonsepsikan oleh Paulo Freire.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang difokuskan pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan tema pendidikan kritis Paulo Freire dan Kurikulum Merdeka. Sumber data dalam penelitian ini meliputi karya-karya primer dan sekunder, yang mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, majalah ilmiah, situs web resmi, serta pemberitaan yang berkaitan langsung dengan pemikiran Paulo Freire maupun implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), dengan melalui tiga tahapan utama, yakni: reduksi data (pemilahan informasi yang relevan), penyajian data (pengorganisasian data dalam kategori atau tema-tema tertentu), dan penarikan kesimpulan (interpretasi makna dan keterkaitan antara konsep-konsep yang dianalisis). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap secara kritis relasi antara prinsip-prinsip pedagogi pembebasan pesfektif Paulo Freire dengan konsep dan praktik Kurikulum Merdeka dalam konteks pendidikan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Paulo Freire

Paulo Freire adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran pendidikan abad ke-20, khususnya dalam pengembangan teori pendidikan kritis. Ia lahir pada 19 September 1921 di Recife, Brasil, dalam keluarga kelas menengah yang kemudian mengalami kesulitan ekonomi akibat krisis ekonomi global tahun 1929. Kondisi kemiskinan yang dialami pada masa kecil inilah yang secara mendalam membentuk kesadaran sosial Freire dan mendorongnya untuk menaruh perhatian besar pada persoalan ketidakadilan, marginalisasi, dan kemiskinan dalam dunia pendidikan. Perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan menjadikan Freire tidak hanya sebagai seorang akademisi, tetapi juga sebagai aktivis sosial yang memperjuangkan keadilan melalui pendidikan (Mahur et al., 2019).

Freire memulai karier profesionalnya sebagai pengajar bahasa Portugis, namun ketertarikannya terhadap pendidikan masyarakat miskin mendorongnya untuk mengembangkan metode pengajaran literasi yang berbasis pada pengalaman hidup

rakyat. Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah proyek literasi untuk petani di Brasil pada tahun 1960-an, di mana ia mengembangkan metode pengajaran membaca yang tidak hanya teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Upaya ini mendapat perhatian luas, tetapi juga menuai resistensi dari rezim militer Brasil yang melihat pendekatannya sebagai ancaman terhadap status quo. Akibatnya, Freire diasingkan dari Brasil dan menjalani masa pengasingan di sejumlah negara seperti Chili, Amerika Serikat, dan Swiss (Roberts, 2017).

Freire menolak model pendidikan tradisional yang memosisikan guru sebagai satu-satunya sumber otoritas dan peserta didik sebagai objek pasif. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya relasi dialogis dan horizontal dalam proses pendidikan, di mana peserta didik dianggap sebagai subjek yang aktif, reflektif, dan memiliki kapasitas untuk mengubah realitas sosialnya. Pendidikan, menurut Freire, bukanlah proses domestikasi, melainkan alat pembebasan.

Pengaruh pemikiran Freire tidak hanya terbatas pada Amerika Latin, tetapi juga meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Afrika, Asia, dan Eropa. Di negara-negara berkembang, gagasan Freire digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam pendidikan masyarakat, pendidikan orang dewasa, hingga pendidikan kritis di sekolah-sekolah formal. Bahkan di dunia Barat, pemikiran Freire banyak digunakan dalam studi-studi postkolonial, pedagogi feminis, serta gerakan pendidikan multikultural. Keunikan pendekatan Freire terletak pada integrasi antara teori dan praksis, yang ia sebut sebagai *praxis* yakni kesatuan antara refleksi dan aksi sebagai jalan menuju transformasi sosial yang berkeadilan (Roberts, 2017).

Paulo Freire kembali ke Brasil pada akhir tahun 1970-an setelah rezim militer mulai melonggarkan kekuasaannya. Ia kemudian menjabat sebagai Sekretaris Pendidikan di kota São Paulo dan terus terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan rakyat hingga akhir hayatnya. Freire wafat pada 2 Mei 1997 di São Paulo, Brasil, pada usia 75 tahun (Roberts, 2017).

Karya Momumental dan Pemikiran Paulo Freire

Paulo Freire dikenal luas melalui karya-karya monumentalnya yang menjadi fondasi utama dalam perkembangan pendidikan kritis (Takona, 2024). Karya yang paling berpengaruh adalah *Pedagogy of the Oppressed* (1970), yang hingga kini dianggap sebagai salah satu teks klasik dalam teori pendidikan dan filsafat sosial. Dalam buku ini, Freire menyampaikan kritik tajam terhadap sistem pendidikan konvensional yang ia sebut sebagai *banking education*, serta menawarkan pendekatan alternatif berupa *problem-posing education*. Buku ini bukan hanya menyoal metode pedagogi, tetapi juga menggambarkan relasi kuasa dalam dunia pendidikan dan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat pembebasan bagi kaum tertindas. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari dua puluh bahasa dan menjadi rujukan utama dalam kajian pendidikan emancipatoris di berbagai belahan dunia (Scocuglia, 2024).

Karya penting lain yang turut membentuk pemikiran Freire adalah *Pedagogy in Process: The Letters to Guinea-Bissau* (1978), yang berisi dokumentasi pengalaman Freire

selama membantu merancang program pendidikan nasional pasca-kolonial di Guine-Bissau, Afrika Barat. Dalam buku ini, Freire menyampaikan surat-surat reflektif yang mencerminkan tantangan dan strategi dalam membangun sistem pendidikan baru di negara yang baru merdeka. Ia menekankan pentingnya menyesuaikan sistem pendidikan dengan konteks lokal, termasuk budaya, sejarah, dan politik, serta menolak replikasi model pendidikan kolonial. Selanjutnya, *The Politics of Education: Culture, Power and Liberation* (1985) menjadi karya yang mengurai hubungan antara pendidikan, kebudayaan, dan kekuasaan. Freire menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu berpihak, baik untuk mempertahankan status quo maupun untuk mendorong perubahan. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan medan perjuangan ideologis di mana bahasa, narasi, dan praktik pembelajaran berperan dalam membentuk kesadaran.

Freire juga memperluas jangkauan pemikirannya dalam *We Make the Road by Walking* (1990), sebuah buku hasil dialog panjang dengan Myles Horton, aktivis pendidikan dari Highlander Folk School di Amerika Serikat. Buku ini memuat diskusi reflektif tentang pengalaman mereka dalam gerakan pendidikan rakyat dan perubahan sosial. Freire menekankan bahwa proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari praksis kolektif yang bersifat membebaskan. Pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di tengah masyarakat sebagai arena perjuangan dan kesadaran bersama. Dalam narasi ini, jalan menuju pembebasan harus dibentuk secara partisipatif melalui dialog, tindakan, dan refleksi yang terus-menerus.

Sisi personal dan reflektif Freire tampak dalam *Letters to Cristina: Reflections on My Life and Work* (1996), di mana ia menuliskan pandangan hidup, nilai-nilai, dan refleksi intelektual kepada menantunya, Cristina. Buku ini memperlihatkan sisi humanistik Freire yang menekankan pentingnya cinta, harapan, dan kerendahan hati dalam pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan tidak dilandasi oleh kebencian, melainkan oleh cinta terhadap kemanusiaan dan komitmen pada perubahan. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa pendidikan kritis tidak hanya menuntut intelektualitas, tetapi juga dimensi afektif dan etis yang mendalam dalam relasi antara pendidik dan peserta didik.

Karya lain yang penting dalam menjelaskan konsep *conscientização* atau kesadaran kritis secara lebih mendalam adalah *Education for Critical Consciousness* (1974). Buku ini menyajikan dua esai utama yaitu *Education as the Practice of Freedom* dan *Extension or Communication*, yang menjelaskan bagaimana pendidikan seharusnya menumbuhkan kesadaran transformatif terhadap realitas sosial. Freire meyakini bahwa peserta didik harus diajak untuk menyadari struktur-struktur ketidakadilan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar memahami dunia, tetapi juga mengubahnya melalui aksi sadar dan kolektif.

Refleksi lanjutan terhadap karya utamanya dituangkan dalam *Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed* (1994), yang merupakan respons terhadap berbagai kritik yang ditujukan kepada *Pedagogy of the Oppressed*. Dalam buku ini, Freire menegaskan bahwa pendidikan sebagai praksis pembebasan harus dilandasi oleh

harapan dan cinta. Ia mengkritik pandangan sinis terhadap dunia dan pendidikan, serta menyuarakan keyakinannya bahwa transformasi sosial hanya mungkin terjadi jika manusia memiliki keberanian untuk bermimpi dan bertindak. Salah satu karya terakhir Freire sebelum wafat adalah *Teachers as Cultural Workers: Letters to Those Who Dare Teach* (1998), yang berisi surat-surat kepada para guru yang ingin menjalankan pendidikan pembebasan. Dalam buku ini, Freire menekankan bahwa guru bukan sekadar penyampai materi, melainkan agen kultural yang memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran sosial peserta didik. Guru harus memiliki keberanian moral untuk berpihak kepada kaum tertindas dan membangun ruang pembelajaran yang dialogis serta kontekstual. Buku ini sangat relevan dalam membangun profesionalisme guru di tengah tantangan transformasi pendidikan kontemporer.

Selain karya tunggalnya, Freire juga menghasilkan beberapa karya kolaboratif yang menampilkan dialog intelektual dengan tokoh-tokoh lain. Salah satunya adalah *Learning to Question: A Pedagogy of Liberation* (1989), yang ditulis bersama Antonio Faundez. Buku ini mengeksplorasi bagaimana proses bertanya menjadi fondasi dari pendidikan yang membebaskan. Bertanya tidak hanya dimaknai sebagai metode, tetapi sebagai tindakan politis yang menantang dominasi dan membuka ruang emansipasi. Paska wafatnya, beberapa tulisan Freire diterbitkan secara anumerta, salah satunya adalah *Pedagogy of Indignation* (2004). Buku ini berisi refleksi Freire terhadap ketimpangan sosial dan kemarahan moral terhadap berbagai bentuk penindasan dalam dunia pendidikan. Karya terakhir adalah *Education and Change* di dalamnya terdapat pembahasan tentang globalisasi, neoliberalisme, serta peran pendidikan dalam konteks Amerika Latin dan dunia ketiga. Melalui buku ini, Freire menegaskan bahwa pendidikan harus selalu terhubung dengan perjuangan struktural yang lebih besar demi menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Dengan demikian, seluruh karya Paulo Freire bukan hanya menyumbang pemikiran teoritis dalam bidang pedagogi, tetapi juga menjadi panduan praksis bagi gerakan sosial, perubahan pendidikan, dan pembebasan manusia secara keseluruhan (Da Trindade et al., 2024).

Telaah Filosofis Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan pendidikan nasional yang secara resmi diimplementasikan secara luas sejak tahun 2022 merupakan kelanjutan dari gagasan Merdeka Belajar yang pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, pada akhir tahun 2019. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk mentransformasi sistem pendidikan Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika abad ke-21, terutama dalam konteks pascapandemi yang menuntut fleksibilitas, kreativitas, dan keberpihakan pada kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka menekankan prinsip otonomi pembelajaran, diferensiasi, serta fleksibilitas dalam penyusunan kurikulum oleh satuan pendidikan (Zuhri et al., 2024).

Secara normatif, semangat merdeka belajar yang menjadi landasan ideologis kurikulum ini bertujuan menggeser paradigma pendidikan dari pendekatan seragam

dan terpusat ke arah yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berpusat pada murid. Hal ini tertuang dalam berbagai dokumen resmi, seperti Platform Merdeka Mengajar, Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka, serta regulasi turunannya. Dalam dokumen-dokumen tersebut ditegaskan bahwa Kurikulum Merdeka berupaya mendorong terciptanya ruang belajar yang memungkinkan peserta didik mengeksplorasi potensi dirinya melalui pembelajaran yang menyenangkan, relevan, dan bermakna (Asiati & Hasanah, 2022).

Namun, secara filosofis, konsep “merdeka” dalam Kurikulum Merdeka lebih sering dimaknai dalam kerangka administratif dan prosedural ketimbang sebagai pembebasan epistemologis atau pedagogis. Kemerdekaan guru dan sekolah dalam menentukan strategi pembelajaran memang mendapat ruang yang lebih luas dibandingkan kurikulum sebelumnya, namun kemerdekaan tersebut masih beroperasi dalam kerangka kebijakan yang tetap terpusat dan bergantung pada instrumen teknokratis seperti asesmen nasional, platform digital, dan indikator kinerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah semangat “merdeka” tersebut benar-benar mampu menciptakan proses pendidikan yang memanusiakan, dialogis, dan transformatif?

Jika ditinjau dari sisi landasan filosofis, Kurikulum Merdeka secara eksplisit mendasarkan dirinya pada aliran filsafat progresivisme dan rekonstruksionisme. Hal ini terlihat dari penekanan pada pembelajaran kontekstual, pengalaman belajar yang otentik, serta penguatan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Namun demikian, pendekatan filosofis ini belum sepenuhnya diiringi oleh refleksi kritis terhadap struktur kekuasaan dalam pendidikan maupun bagaimana ideologi-ideologi tertentu mengkonstruksi narasi “kemerdekaan” dalam kurikulum. Di sinilah pentingnya analisis kritis yang dapat menilai sejauh mana kurikulum ini benar-benar membebaskan, bukan sekadar memodifikasi pendekatan pengajaran (Noviantari & Agustina, 2023).

Dari sisi landasan sosiologis, Kurikulum Merdeka mengakui pentingnya konteks sosial dan budaya dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini memberi keleluasaan bagi sekolah untuk mengadaptasi materi dan metode ajar sesuai dengan kondisi lokal, latar belakang sosial peserta didik, dan aspirasi komunitas. Namun pada praktiknya, banyak satuan pendidikan, terutama di daerah tertinggal atau kurang sumber daya, masih kesulitan dalam mengembangkan kurikulum yang benar-benar kontekstual. Kesenjangan infrastruktur, kapasitas guru, dan dukungan kebijakan di tingkat daerah menjadi faktor penghambat utama yang menjauhkan semangat ideal dari realitas lapangan (Pratycia et al., 2023).

Sementara dari aspek psikologis, Kurikulum Merdeka berlandaskan pada pendekatan humanistik dan konstruktivistik. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif, membangun pengetahuan melalui pengalaman, serta mengembangkan potensi diri sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Dalam kerangka ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar secara dialogis. Namun dalam kenyataannya, banyak guru masih terjebak dalam pendekatan instruksional tradisional karena terbatasnya pelatihan dan pendampingan yang

memadai dalam memahami filosofi serta metodologi kurikulum ini secara utuh (Rohinsa, 2023).

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara narasi normatif yang dikembangkan oleh pemerintah dan realitas implementatif di lapangan. Semangat pembebasan yang diusung dalam slogan merdeka belajar belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pedagogi di kelas maupun dalam cara pandang institusi pendidikan terhadap peserta didik. Di sinilah pentingnya membaca dan menganalisis Kurikulum Merdeka melalui perspektif pendidikan kritis Paulo Freire, agar transformasi pendidikan yang diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar menyentuh dimensi kesadaran, emansipasi, dan kemanusiaan.

Kritik Kurikulum Merdeka Perspektif Paulo Freire

Kurikulum Merdeka, yang lahir dari semangat transformasi pendidikan nasional pascareformasi dan diperkuat oleh tuntutan zaman digital dan disrupti global, menawarkan konsep pembelajaran yang berpihak pada murid, fleksibel, serta berbasis pada kebutuhan dan konteks lokal. Secara eksplisit, kebijakan ini menandai pergeseran dari pendekatan pendidikan yang bersifat top-down menuju ruang partisipatif yang memberi otonomi lebih luas kepada satuan pendidikan dan pendidik. Namun, bila ditelaah dari sudut pandang pendidikan kritis Paulo Freire, gagasan merdeka belajar yang menjadi tonggak ideologis Kurikulum Merdeka justru menyimpan ambiguitas yang perlu dibedah secara struktural, epistemologis, dan praksis.

Paulo Freire dalam pemikirannya menolak sistem pendidikan yang ia sebut sebagai *banking model*, yakni sebuah pendekatan di mana peserta didik diposisikan secara pasif sebagai wadah kosong yang harus diisi oleh pengetahuan dari guru yang dianggap sebagai pemilik kebenaran dan otoritas tunggal dalam proses pembelajaran. Model ini, menurut Freire, bukan hanya mematikan daya pikir kritis siswa, tetapi juga menjadikan pendidikan sebagai alat reproduksi kekuasaan yang mempertahankan ketimpangan sosial (Nugraha et al., 2024). Dalam bingkai ini, guru menanamkan informasi tanpa membuka ruang dialog, sementara murid hanya menerima dan menghafal tanpa memahami konteks sosial dari pengetahuan yang disampaikan. Akibatnya, pendidikan kehilangan fungsi emansipatorisnya dan berubah menjadi sarana domestikasi, di mana peserta didik dibentuk untuk patuh terhadap tatanan yang sudah mapan (Sobon & Astari, 2024).

Freire menawarkan pendekatan *problem-posing education*, yakni pendidikan sebagai ruang dialogis, reflektif, dan membebaskan. Dalam model ini, guru dan murid dipandang sebagai sesama subjek yang secara aktif berinteraksi untuk memahami dan mengubah dunia. Pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, melainkan menjadi proses ko-konstruktif, di mana pengetahuan tumbuh dari refleksi kritis atas realitas yang dialami bersama (Khandekar, 2021). Tujuan dari pendekatan ini adalah membongkar struktur penindasan yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong lahirnya kesadaran transformatif atau *conscientização* yakni kemampuan untuk mengenali ketidakadilan dan berupaya mengubahnya secara kolektif.

Jika prinsip-prinsip Freire ini dijadikan lensa untuk mengamati Kurikulum Merdeka, tampak adanya ketegangan yang signifikan antara bahasa normatif dalam dokumen kebijakan dan kenyataan praksis pedagogis di lapangan. Kurikulum Merdeka memang memuat istilah dan semangat yang secara sekilas sejalan dengan gagasan pendidikan emansipatoris seperti pembelajaran yang berpihak pada murid, otonomi guru, dan kontekstualisasi pembelajaran. Namun dalam implementasinya, semangat tersebut seringkali tidak disertai dengan struktur yang memungkinkan terjadinya dialog sejati dan pembebasan. Guru tetap terikat pada instrumen administratif, asesmen standar, dan beban pelaporan digital, sementara ruang refleksi kritis bersama peserta didik sangat terbatas. Dalam konteks ini, kebebasan yang dijanjikan oleh Kurikulum Merdeka lebih condong pada kebebasan administratif yang bersifat semu, bukan kebebasan substantif sebagaimana dimaksud oleh Freire, yaitu kebebasan untuk menyadari, mempertanyakan, dan mengubah kondisi ketidakadilan sosial melalui proses pendidikan (R. Deti Rostika, Aulia Nurjannah, 2022).

Secara diskursif, Kurikulum Merdeka memang menggunakan bahasa yang menyerupai pendidikan emansipatoris. Terminologi seperti “pembelajaran yang berpihak pada murid,” “otonomi guru,” dan “kontekstualisasi pembelajaran” mengisyaratkan upaya untuk mendekonstruksi sistem pendidikan yang seragam dan birokratis. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini masih terjebak dalam paradoks teknokratisasi pembebasan. Otonomi yang dijanjikan kepada guru seringkali justru dibingkai dalam kontrol yang bersifat digital dan instrumentalis, seperti melalui platform Merdeka Mengajar, asesmen nasional berbasis numerik, dan tuntutan pengisian data yang padat. Di sini, kemerdekaan bukan berarti pembebasan eksistensial dan epistemik, melainkan pelimpahan tanggung jawab administratif tanpa pembongkaran struktural terhadap relasi kuasa dalam pendidikan.

Dalam perspektif pendidikan kritis Freirean, merdeka belajar tidak cukup hanya dimaknai sebagai kebebasan memilih kurikulum atau metode. Kemerdekaan sejati dalam pendidikan adalah kebebasan untuk menyadari struktur penindasan dan kemampuan untuk bertindak mengubahnya. Maka Kurikulum Merdeka, jika ingin benar-benar menjadi instrumen pembebasan, harus mengatasi tiga ilusi: (1) ilusi kebebasan administratif sebagai kebebasan substantif, (2) ilusi partisipasi yang tidak dibarengi kesadaran ideologis, dan (3) ilusi kontekstualisasi yang tidak menggugat ketidakadilan struktural. Tanpa pembongkaran terhadap struktur tersebut, Kurikulum Merdeka hanya akan menjadi reformulasi status quo dalam kemasan retoris yang progresif (Madhakomala et al., 2022).

Freire menegaskan pendidikan harus berpijak pada realitas konkret peserta didik dan bersifat kontekstual terhadap kehidupan sosial, politik, dan kultural mereka. Kurikulum Merdeka mengklaim mengakomodasi konteks lokal melalui fleksibilitas kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Namun implementasi kontekstualisasi ini tidak selalu menjamin pembebasan. Sering kali ia hanya bersifat kosmetik: guru diharapkan menyusun kurikulum kontekstual dalam kerangka indikator kinerja yang ditetapkan pusat, tanpa

dialog kritis mengenai struktur ketimpangan yang dialami peserta didik dalam realitas sosial mereka. Dalam kerangka Freirean, hal ini menjadikan Kurikulum Merdeka rentan menjadi reformasi palsu yang mengganti terminologi tetapi tidak menyentuh akar ideologis pendidikan yang hegemonik.

Dalam kerangka pendidikan kritis Paulo Freire, guru bukanlah sosok teknokrat netral yang sekadar menyampaikan materi pelajaran, tetapi merupakan seorang *intellectual organic* yakni agen pembebasan yang memiliki kesadaran terhadap posisi sosial-politiknya dan bertanggung jawab mengarahkan pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Guru diposisikan sebagai pelaku aktif dalam praksis politik pendidikan, yang tidak hanya mendampingi siswa dalam memahami dunia, tetapi juga bersama-sama menafsirkan dan mentransformasikan realitas yang menindas. Peran ini menuntut guru tidak semata menjadi fasilitator, tetapi lebih jauh sebagai *co-investigator*, mitra dialogis peserta didik dalam membongkar struktur sosial yang menciptakan ketimpangan dan dominasi (Mohanty, 2022).

Namun, dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, ruang struktural untuk peran transformatif ini masih sangat terbatas. Guru cenderung ditempatkan dalam posisi sebagai eksekutor kebijakan pusat, terikat pada kerangka teknis dan prosedural, seperti pengisian data platform digital, pencapaian target asesmen, serta penyusunan modul ajar berdasarkan standar yang telah dirancang secara *top-down*. Meskipun wacana otonomi guru dan kontekstualisasi pembelajaran terus digemakan, dalam realitasnya otonomi ini sering kali bersifat administratif dan operasional, bukan ideologis dan substantif. Bahkan pelatihan guru yang seharusnya menjadi ruang penguatan kapasitas intelektual dan kesadaran kritis, lebih banyak diorientasikan pada kepatuhan teknis terhadap format dan indikator, bukan pada refleksi kritis terhadap tujuan dan nilai pendidikan.

Freire menekankan bahwa pendidikan yang membebaskan harus bertumpu pada *dialog*, namun bukan dalam arti diskusi permukaan atau kerja kelompok biasa. Dialog dalam pengertian Freirean adalah proses kesadaran kolektif yang lahir dari pertemuan horizontal antara guru dan siswa sebagai subjek sejarah. Ini adalah dialog yang tidak hanya membicarakan isi pelajaran, tetapi merefleksikan kondisi sosial-politik peserta didik dan mengarah pada tindakan transformasi (Nastia & Pratama, 2023). Dalam praktik Kurikulum Merdeka, meskipun terdapat elemen yang menyerupai semangat dialogis seperti diskusi kelas, pembelajaran kolaboratif, atau projek P5 namun mayoritas belum menyentuh aspek struktural dari realitas sosial siswa. Misalnya, projek P5 yang bertujuan menumbuhkan karakter pelajar Pancasila sering kali disimplifikasi menjadi kegiatan simbolik tanpa membuka ruang diskusi kritis tentang ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, relasi kuasa, diskriminasi, atau isu-isu marginalisasi lainnya yang nyata di sekitar kehidupan peserta didik (Giroux, 2010a).

Ketiadaan ruang struktural untuk pembahasan soal ketimpangan sosial dalam kurikulum dan aktivitas pembelajaran menyebabkan pendidikan karakter yang diusung oleh Kurikulum Merdeka cenderung netral secara politik. Padahal, menurut Freire, pendidikan tidak pernah netral. Ia selalu berpihak baik kepada penindas maupun

kepada yang tertindas. Ketika pendidikan menghindari sikap berpihak, ia secara diam-diam memperkuat tatanan yang menindas. Maka, netralitas dalam pendidikan justru adalah bentuk dehumanisasi, karena mengabaikan penderitaan sosial dan menolak potensi manusia untuk mengubah dunia (Leach, 1982).

Bagi Freire, esensi pendidikan adalah *humanization*, yaitu proses memanusiakan manusia melalui penyadaran akan realitas sosial yang menindas dan penggalian kekuatan transformatif dalam diri manusia untuk membebaskan dirinya. Maka keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak cukup dinilai dari seberapa adaptif ia terhadap teknologi, fleksibilitas metode, atau kecocokan dengan kebutuhan industri, tetapi dari sejauh mana kebijakan itu mengembalikan pendidikan pada hakikatnya sebagai praksis politik yang membela mereka yang tersingkir, yang tertindas, dan yang dibungkam. Kurikulum Merdeka, bila tidak dikritisi secara ideologis, dapat terperosok ke dalam jebakan retorika progresif yang menyembunyikan mekanisme kontrol baru: kemerdekaan yang dijanjikan bisa saja menjadi bentuk baru dari dominasi yang lebih tersembunyi, melalui logika manajemen, evaluasi numerik, dan kontrol platform digital yang bersifat invasif (Latifah et al., 2021).

Pemikiran Paulo Freire menjadi sangat mendesak untuk digunakan sebagai lensa epistemik dalam menilai, mengkritik, dan menuntun arah kebijakan Kurikulum Merdeka. Freire tidak hanya menawarkan alternatif pedagogis, tetapi juga membuka ruang bagi pendidikan untuk menjadi alat pembebasan kolektif yang berakar pada kesadaran kritis, dialog sejati, dan aksi transformatif. Kurikulum Merdeka hanya akan menjadi proyek emansipatoris sejati jika mampu menjadikan peserta didik dan guru sebagai subjek sejarah yang sadar akan realitasnya dan berani mengubahnya.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka meskipun dikembangkan atas nama pembebasan dan fleksibilitas pendidikan, belum sepenuhnya mencerminkan esensi pendidikan emansipatoris sebagaimana dimaknai oleh Paulo Freire. Kurikulum ini memang mengadopsi istilah-istilah progresif seperti “merdeka belajar,” “pembelajaran kontekstual,” dan “otonomi guru,” namun dalam pelaksanaannya masih sarat dengan pendekatan teknokratis dan instrumen kontrol yang bersifat administratif serta numerik. Dalam konteks pendidikan kritis, hal ini menciptakan paradoks: kebebasan yang dijanjikan justru terkungkung dalam struktur yang tidak membebaskan secara ideologis. Freire menekankan bahwa pendidikan harus menjadi proses dialogis, reflektif, dan politis. Guru bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek ideologis yang berperan sebagai agen transformasi sosial. Namun dalam Kurikulum Merdeka, peran guru dan siswa masih dibatasi dalam kerangka prosedural dan kurang diberdayakan untuk membongkar realitas struktural ketimpangan. Dialog yang terjadi di ruang kelas pun cenderung dangkal dan tidak diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis.

Dengan demikian, dalam perspektif Freire, Kurikulum Merdeka masih berada pada titik kompromi antara wacana pembebasan dan praktik penyesuaian terhadap sistem. Ia belum sepenuhnya mampu mentransformasi pendidikan sebagai alat humanisasi dan praksis politik yang membebaskan. Agar benar-benar menjadi instrumen emansipasi, Kurikulum Merdeka perlu melampaui retorika administratif dan memberikan ruang nyata bagi pembentukan kesadaran kritis, relasi dialogis sejati, serta keberpihakan pada peserta didik sebagai subjek perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Novita, D. (2025). Teachers' perception of the implementation of project-based learning in early childhood education in Indonesia. *Cogent Education*, 12(1), 1-21. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2458663>
- Ardianti, Y., & Amalia, N. (2022). Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3), 399-407. <https://doi.org/10.23887/jppp.v6i3.55749>
- Asiati, S., & Hasanah, U. (2022). Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Di Sekolah Penggerak. *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, 19(2), 61-72. <https://doi.org/10.54124/jlmp.v19i2.78>
- Da Trindade, A., Robertson, S. L., & Torres, C. A. (2024). Introduction to special issue: Paulo Freire - global educator. *Globalisation, Societies and Education*, 22(1), 1-6. <https://doi.org/10.1080/14767724.2023.2289167>
- Giroux, H. A. (2010a). Paulo Freire and the Crisis of the Political. *Power and Education*, 2(3), 335-340. <https://doi.org/10.2304/power.2010.2.3.335>
- Giroux, H. A. (2010b). Rethinking Education as the Practice of Freedom: Paulo Freire and the Promise of Critical Pedagogy. *Policy Futures in Education*, 8(6), 715-721. <https://doi.org/10.2304/pfie.2010.8.6.715>
- Hanifah, W., Subiyantoro, S., & Muzzazinah. (2023). Analysis of teacher readiness to implement the Pancasila student profile strengthening project. *Proceedings of the 6th International Conference on Learning Innovation and Quality Education (ICLIQE 2022)*, 671-681. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-114-2_63
- Hutahaean, B., Telaumbanua, S., Tamba, L., Hutabarat, R. G. N., & Suman, S. (2024). Analysis of Innovative and Adaptive Higher Education Curriculum Development to Education 5.0 Based Challenges in Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(4), 76-98. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.4.5>
- Khandekar, S. (2021). Paulo Freirean Ideas at the Grassroots: From Problem Posing Education to Critical Consciousness. *The International Journal of Community and Social Development*, 3(1), 30-44. <https://doi.org/10.1177/25166026211002937>
- Latifah, P. N., Habibi, M. D., & Susandi, A. (2021). Konsep Pendidikan Humanistik Dalam Konteks Pemikiran Paulo Freire Dan K.H Ahmad Dahlan. *IQRO: Journal of Islamic*

- Education*, 4(2), 103–116. <https://doi.org/10.24256/iqro.v4i2.2256>
- Leach, T. (1982). Paulo Freire: Dialogue, Politics and Relevance. *International Journal of Lifelong Education*, 1(3), 185–201. <https://doi.org/10.1080/0260137820010302>
- Lestari, P. D. J. P., Bahrozi, I., & Yuliana, I. (2023). Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 9(3), 153–160. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v9n3.p153-160>
- Madhakomala, Aisyah, L., Rizqiqa, F. N. R., Putri, F. D., & Nulhaq, S. (2022). Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pemikiran Pendidikan Paulo Freire. *At- Ta'lim : Jurnal Pendidikan*, 8(2), 162–172. <https://doi.org/10.55210/attalim.v8i2.819>
- Mahur, Y., Riyanto, Y., & Roesminingsih, E. (2019). Paulo Freire: Critical, Humanist and Liberating Education (Critical Reflections on Indonesian Education). *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(8), 873. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i8.2242>
- Mohanty, C. T. (2022). *The Pedagogy of Action* (N. Z. Haniff (ed.)). Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-0801-9>
- Nastia, G. I. P., & Pratama, Y. A. (2023). A Strength-Based Assessment for Optimizing Local Potential: A Study of Lingga Village, Muara Enim Regency, Indonesia. In *WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Vol. 12, Issue 1). Al-Jamiah Research Centre. <https://doi.org/10.14421/welfare.2023.121-04>
- Noviantari, I., & Agustina, D. A. (2023). Development of Teaching Modules on Independent Curriculum Implementation. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 6(1), 465. <https://doi.org/10.20961/shes.v6i1.71154>
- Nugraha, A. E., Wibowo, D., & Hendrawan, B. (2024). Paulo Freire's Critical Pedagogy Analysis Of Educational Transformation. *MSJ : Majority Science Journal*, 2(2), 220–228. <https://doi.org/10.61942/msj.v2i2.157>
- Nur Kholifah Akrom, Abd. Aziz, Agus Zaenul Fitri, & Venant Hakizimana. (2023). Implementing Independent Learning Curricula: A Case Study from MAN 2 Kediri, Indonesia. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 147–161. <https://doi.org/10.14421/manageria.2023.82-03>
- Nurfadila, A., Mahyuni, M., Sujana, I. M., & Arifuddin, A. (2023). Problems in the Implementation of Independent Curriculum (IC) A Case Study at SMAN 1 Masbagik in Academic Year 2022/2023. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1620–1630. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1471>
- Pratycia, A., Dharma Putra, A., Salsabila, A. G. M., Adha, F. I., & Fuadin, A. (2023). Analisis Perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 58–64. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1974>
- R. Deti Rostika, Aulia Nurjannah, L. M. (2022). The Role Of The Educator In Improving The Learning Process Through The Paulo Freire Problem Method. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, 5(2), 55–59.

- <https://doi.org/10.55215/jppguseda.v5i2.5977>
- Roberts, P. (2015). Paulo Freire and Utopian Education. *Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies*, 37(5), 376–392. <https://doi.org/10.1080/10714413.2015.1091256>
- Roberts, P. (2017). Paulo Freire. In *Oxford Research Encyclopedia of Education*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.10>
- Rohinsa, M. (2023). Peran Dukungan Guru Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Psikologis Dasar Siswa Dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 8(2), 266–273. <https://doi.org/10.25105/pdk.v8i2.15456>
- Scocuglia, A. C. (2024). Paulo Freire: An educator of the present and the future. *International Review of Education*, 70(2), 359–370. <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10083-9>
- Sobon, K., & Astari, T. (2024). Konsep Pendidikan Berbasis Masalah Paulo Freire dan Relevansinya dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(2), 266–275. <https://doi.org/10.23887/jfi.v7i2.71506>
- Sutinah, C., Riyadi, A. R., Muftianti, A., Wulandari, M. A., & Ruqoyyah, S. (2024). Navigating Change: An Analysis of Elementary School Teachers' Readiness and Implementation Challenges with the Merdeka Curriculum. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 1718–1729. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.5142>
- Takona, J. P. (2024). Five Decades after Paulo Freire's Enduring Legacy in Modern Education: A Reflective Essay. *The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies*, 19(2), 25–43. <https://doi.org/10.18848/2327-011X/CGP/v19i02/25-43>
- Wahyudi, R., Hariyati, N., & Mariana, N. (2024). Implementasi Manajemen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMPN Kabupaten Magetan. *Journal of Education Research*, 5(3), 3311–3317. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1056>
- Zuhri, S., Suwindia, I. G., & Ari Winangun, I. M. (2024). Literasi digital dan kecakapan abad ke-21: analisis komprehensif dari literatur terkini. *Education and Social Sciences Review*, 5(2), 149. <https://doi.org/10.29210/07essr500300>